

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENERAPAN PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERIAN KREDIT DI
PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU**

***SUPPORTING FACTORS AND OBSTACLES TO THE APPLICATION OF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN PROVISION OF
CREDIT IN PT. BTPN BANK BRANCH PEKANBARU***

Putri Dwi Yulisa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

putridwiyulisa28@gmail.com

ABSTRAK

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Buruknya tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi melemah. Semenjak saat itu semua pihak sepakat untuk bangkit dari keterpurukan dengan memulai tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG di semua lini masyarakat. Dalam menerapkan prinsip gcg ini tentunya setiap perusahaan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan bisnisnya. Masalah pokok dari penelitian ini yaitu, apakah faktor penghambat dan pendukung pada Penerapan GCG dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada penerapan prinsip good corporate governance dalam pemberian kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil data langsung ke lapangan berdasarkan sumber dengan populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh hasil pembahasan dari hasil dapat diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Faktor pendukung dari penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru adalah adanya kerjasama dan kekompakan setiap pegawai marketing, terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam bank untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi, adanya harapan yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari karyawan, para karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan cepat tanggap kepada setiap calon nasabah, dan adanya rasa saling percaya antara karyawan dan calon nasabah yang berkepentingan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang *Good Corporate Governance*, tidak adanya pengarahan dari Pimpinan

Cabang minimal satu kali dalam sebulan dan tidak adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh bank yang mengacu kepada penerapan *good corporate governance* secara umum.

Kata kunci: pendukung, penghambat, prinsip, *good corporate governance*, kredit.

ABSTRACT

The 1998 crisis that occurred included one of them was the corporate crisis. has made many parties aware of the importance of building a strong business structure. The corporate crisis, especially large business groups that have been supporting the economy so far has fallen. Entering the era of globalization and facing fast-moving economic growth, The banking sector is one that must be maximally developed. Under the Banking Law, one of the bank's activities is credit. Giving credit is a bank activity that contains risks that can affect the health and sustainability of the bank, therefore in its implementation it must apply the principles of Good Corporate Governance, one of the factors that determines bank health is the principle of Good Corporate Governance. The main problem of this research is the Implementation of Good Corporate. Main promblem is Governance in Providing Credit at PT. Pekanbaru Branch BTPN Bank. The purpose of this research was to find out the Application of Good Corporate Governance in Providing Credit at PT. Pekanbaru Branch BTPN Bank. This type of research is sociological legal research, namely research that takes data directly to the field based on sources, with the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool. Then from the data taken the data is processed so that the results of the discussion of the results can be obtained conclusions by the deductive method. This research is descriptive, namely research that explains in clear and detail. Supporting factors of the implementation of Good Corporate Governance at PT. Bank BTPN Pekanbaru Branch is the cooperation and cohesiveness of every marketing employee, there is an audit committee that supervises effectively within the bank to avoid deviations that may occur, the existence of high expectations from each prospective customer to get excellent service from employees, employees are required to provide friendly, courteous and responsive service to each prospective customer, and the existence of mutual trust between employees and interested prospective customers. While the inhibiting factor is the lack of knowledge of some marketing about Good Corporate Governance, no direction from the Branch Manager at least once a month and the absence of regulations/policies issued by banks that refer to the implementation of good corporate governance in general.

Keywords: principles, good gorporate governance, credit.

PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demorasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan tentang demokrasi, namun dapat dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila harus terhindar dari : ¹

1. Sistem *free light liberalism*, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
2. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi, daya kreasi unit-unit ekonomi di luar negara
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok.

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.²

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan³. Menurut undang-undang perbankan pasal 1 angka 11 kredit merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana dengan pemberian bunga. Untuk memperoleh kredit bank calon nasabah harus melakukan beberapa tahap, mulai dari tahap pengajuan

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm 63

² Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 98.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 57

aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berlaku bagi setiap calon nasabah yang membutuhkan kredit bank.

Fokus utama bank adalah mencegah risiko dan menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dana masyarakat yang tersimpan di bank semata-mata hanya berdasarkan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank tersebut, dan masyarakat percaya bahwa dana yang dititipkan tersebut akan kembali dengan ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi berbagai bentuk investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tindakan ini tidak ditangani secara profesional, hati-hati dan transparan (*prudential banking*) maka akan dapat menimbulkan risiko yang besar.⁴

Zaman sekarang ini, dalam prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam masalah perkreditan. Salah satu rusaknya sistem perbankan adalah perilaku pengelola atau pihak bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan ke dalam kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sudut eksternal maupun internal. Faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada umumnya berkaitan dengan pihak analisis bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan kredit bermasalah adalah keadaan perekonomian nasabah yang tidak mendukung perkembangan usaha namun disatu sisi debitur mempunyai

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm 69

kemauan atau itikad untuk membayar akan tetapi disisi lain ada pula debitur yang tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk tidak membayar angsuran kredit.⁵

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank karena kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat.⁶ Salah satu faktor yang menentukan kesehatan bank adalah penerapan *good corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Dalam industri perbankan kebutuhan terhadap penerapan prinsip gcg juga dirasakan sangat kuat. Munculnya berbagai risiko kegiatan usaha perbankan, serta kompleksnya situasi eksternal dan internal perbankan. Dengan keadaan tersebut kebutuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik semakin meningkat.

Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu GCG memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis perbankan, bisa berdampak pada perekonomian nasional karena dengan kondisi perbankan yang sehat akan memungkinkan bank aktif membiayai kegiatan perekonomian negara.⁷ Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.⁸

PT. Bank BTPN sebagai lembaga perbankan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama wajib menerapkan segala prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terus dilakukan dengan pembenahan, pemahaman dan penguatan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai hasil terbaik. Jika perusahaan telah

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-3, hlm 102

⁶ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius 2003, hlm 96

⁷ Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bagian Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 144

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 1

melakukan prinsip-prinsip GCG maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan prinsip *good corporate governance* pada perbankan merupakan sistem tata kelola perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Sangat penting bagi bank untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan hambatan setiap aktifitas perbankan. Apabila perbankan dapat mengetahui faktor-faktor tersebut maka perbankan dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik.⁹

Maka berangkat dari fenomena tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam menyikapi permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul : Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru

Bisnis merupakan salah satu dunia yang paling ramai diperbincangkan dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Kantor Cabang Pekanbaru adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang usahanya memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat berupa simpanan, jasa-jasa perbankan, sedangkan yang menjadi aktivitas utamanya merupakan penyalur dana bank yaitu pemberian kredit, terutama kredit pensiun untuk para pensiun. Tetapi setiap

⁹ Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 88

perusahaan pasti mempunyai hambatan dan pendukung dalam menjalankan setiap kegiatan usaha perusahaan.

Sangat penting bagi bank untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan hambatan setiap aktifitas perbankan. Apabila perbankan dapat mengetahui faktor-faktor tersebut maka perbankan dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik.

Segala kegiatan operasional perbankan dapat terlaksana dengan baik di akibatkan karena adanya beberapa faktor yang mendorong. Namun demikian adapula pelaksanaan yang belum berjalan dengan maksimal yang disebabkan adanya beberapa faktor penghambat. Dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* pada pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, di antaranya:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* di antaranya :

- 1) Adanya aturan hukum yang baik dan memadai mulai dari Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri BUMN, Peraturan Bank Indonesia, sampai pada Peraturan Perusahaan yang dibuat sendiri. Hal ini di anggap mampu dalam menjamin berlakunya kepastian hukum yang efektif dan efisien.
- 2) Adanya dukungan dari publik maupun Lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pererapan *Good Corporate Governance* ini.
- 3) Adanya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat sehingga dapat menjadi pedoman terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.

b. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- 1) Adanya kerjasama dan kekompakan setiap pegawai marketing. Artinya, marketing ketika terjun langsung ke lapangan saling melengkapi maupun saling membantu dan adanya koordinasi antar pegawai, sehingga memiliki kesamaan dalam penyampaian informasi mengenai produk kredit kepada calon nasabah. Kesamaan penyampaian informasi ini diharapkan dapat diterima dan dimengerti oleh calon nasabah sehingga informasi yang diperoleh jelas, tepat dan akurat sebagaimana dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance.
- 2) Terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam bank untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya unit yang mengawasi setiap kegiatan perbankan, maka mengharuskan setiap karyawan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank umum, dapat disimpulkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan. Pada beberapa jenis usaha di Indonesia, seperti perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), keberadaan Komite Pemantau Risiko dalam struktur organisasi telah diwajibkan berdasarkan beragam peraturan yang ditetapkan pihak regulator terkait. Peraturan tersebut ditetapkan demi mendukung peningkatan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan.
- 3) Adanya harapan yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari karyawan. Bank yang berorientasi pada masa

depan adalah bank yang mempunyai jalinan hubungan yang baik dengan nasabah-nasabahnya. Tanpa adanya dorongan dan harapan dari nasabah, maka Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak akan mengerti hal apa saja yang diinginkan dan diharapkan oleh nasabah. Berbagai cara telah dilakukan oleh Bank BTPN dalam menampung keluhan dan harapan pelanggannya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga akan memberikan hasil yang baik bagi nasabah dan juga bank.

- 4) Para karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan cepat tanggap kepada setiap calon nasabah. Adanya tuntutan ini maka dilakukan secara beriringan untuk harus menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam prosedur pemberian kredit.
- 5) Adanya rasa saling percaya antara karyawan dan calon nasabah yang berkepentingan. Ketika memberi penjelasan kepada calon nasabah mengenai kredit, karyawan memberi kebebasan kepada calon nasabah untuk memilih atau tidak memilih, kemudian karyawan melakukan pekerjaannya dengan jujur sehingga mengurangi adanya penyelewengan dan kecurangan.
- 6) Adanya komunikasi yang baik antara sesama karyawan. Membangun komunikasi yang baik pada seluruh karyawan salah satu kunci sukses nya Bank BTPN Cabang Pekanbaru dalam mencapai kredibilitasnya.
- 7) Adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan Bank BTPN cabang Pekanbaru, dengan tetap mempertahankan integritas individu maupun Bank.
- 8) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- 9) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik

dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi kegagalan dalam penerapan *Good Corporate Governance* diantaranya:

- 1) Tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan
- 2) Tidak memanfaatkan sebaik – baiknya semua masukan yang diberikan pemegang saham dan kreditor.
- 3) Saling ketergantungan dalam pengendalian resiko

b. Faktor Internal

Faktor internal adalah beberapa faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang sangat mempengaruhi kegagalan pelaksanaan praktek GCG. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang esensi *Good Corporate Governance*. Kemampuan menangkap dan mempersepsikan pengertian *good corporate governance* masih kurang. Beberapa orang marketing tidak menguasai tentang makna GCG .
- 2) Kurangnya sosialisasi bank terhadap prinsip-prinsip GCG, pengenalan mengenai GCG hanya di berikan saat pelatihan pertama karyawan diterima berkerja.
- 3) Tidak adanya pengarahan dari Pimpinan Cabang minimal satu kali dalam sebulan. Setidaknya jika arahan tersebut, yang harus disampaikan adalah setiap kegiatan operasional bank tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat terutama penerapan

prinsip GCG. Dengan adanya pemberitahuan tersebut sekedar untuk mengingatkan kembali kepada seluruh karyawan Bank BTPN Cabang Pekanbaru untuk selalu berada di jalur yang benar dalam bekerja agar dapat meminimalisir segala risiko yang mungkin saja bisa terjadi.

- 4) Tidak adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh bank yang mengacu kepada penerapan *good corporate governance* secara umum.
- 5) Tidak adanya struktur kewenangan dan tanggung jawab baku yang tersusun dalam struktur organisasi perusahaan.
- 6) Kurang aktifnya Dewan Direksi dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan

PT. Bank BTPN sebagai lembaga perbankan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama wajib menerapkan segala prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terus dilakukan dengan pembenahan, pemahaman dan penguatan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai hasil terbaik. Jika perusahaan telah melakukan prinsip-prinsip GCG maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum. Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau secara sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari RUPS, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan Kerja Audit Intern atau Satuan Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua merupakan seluruh jajaran karyawan atau disebut sebagai *enterprise-wide*, yang menjadi sarana Direksi untuk melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau stakeholders, yaitu regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan baik.¹⁰

¹⁰ Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm 76

Penerapan prinsip *good corporate governance* pada perbankan merupakan sistem tata kelola perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu bank dikelola dengan manajemen yang professional sehingga mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu. Dalam memberikan pedoman dan motivasi kepada bankir untuk mengelola usaha perbankan, tata kelola perbankan nasional memerlukan system manajemen yang baik. Maka dari itu sangat diperlukan adanya suatu pengaturan dan pengawasan bank agar dapat memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati. Dengan demikian tingginya harapan terhadap dunia perbankan untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mengemban visi misi perbankan nasional dalam mendukung sector ekonomi dan bisa tumbuh secara mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Faktor eksternal pendukung berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate Governance di antaranya : Adanya aturan hukum yang baik dan memadai mulai dari Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri BUMN, Peraturan Bank Indonesia, sampai pada Peraturan Perusahaan yang dibuat sendiri. Adanya dukungan dari publik maupun Lembaga pemerintah dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance ini. Adanya contoh pelaksanaan Good Corporate Governance yang tepat sehingga dapat menjadi pedoman terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan Good Corporate Governance. Adapun faktor pendukung internalnya adalah Adanya kerjasama dan kekompakan setiap pegawai marketing. Terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam bank untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Adanya harapan

yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari karyawan. Para karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan cepat tanggap kepada setiap calon nasabah.

Faktor penghambat eksternalnya adalah Tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan Tidak memanfaatkan sebaik – baiknya semua masukan yang diberikan pemegang saham dan kreditor. Saling ketergantungan dalam pengendalian resiko. Adapun faktor penghambat secara internal Kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang esensi *Good Corporate Governance*. Kurangnya sosialisasi bank terhadap prinsip-prinsip GCG, pengenalan mengenai GCG hanya di berikan saat pelatihan pertama karyawan diterima berkerja. Tidak adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh bank yang mengacu kepada penerapan *good corporate governance* secara umum.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberi masukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Bank BTPN Cabang Pekanbaru, diharapkan diadakannya seminar atau pelatihan mengenai Good Corporate Governance minimal satu kali dalam enam bulan. Agar semua karyawan selalu ingat dan memahami dan dapat mempersepsikan GCG.
2. Diharapkan Bank mengeluarkan kebijakan yang mengatur penerapan good corporate governance secara umum, hal ini diharapkan agar mengikat semua karyawan bank untuk selalu sadar bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional minimal harus berdasarkan kebijakan Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh bank.

REFERENSI

- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius 2003
- Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2008
- Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia Cet. Ke-3*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bagian Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012